PONTIANAK NUTRITION JOURNAL
Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
P-ISSN 2622-1691, E-ISSN 2622-1705

PNJ

PONTIANAK NUTRITION JOURNAL
http://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/PNJ/index

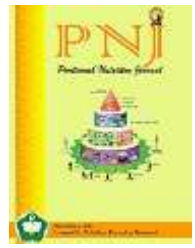

Analisis Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024

Karina Dwi Handini[1]✉, Ratmawati[1], Emilia[1]

[1]Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, Indonesia

Info Artikel

Keywords:
Ketahanan Pangan, IKP, FSVA

Abstrak

Ketahanan pangan berkembang dengan konsep menjamin setiap individu dan setiap saat dapat mengakses pangan sebagai makanan pokok yang dibutuhkan baik secara fisik dan ekonomi. Ketahanan pangan dan gizi merupakan pilar ke empat dalam strategi percepatan pencegahan stunting. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berada pada kategori tahan dengan indeks 71,21. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 73,22 (kategori tahan). Tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan berturut-turut menjadi 71,71, 71,14 dan 70,21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Situasi ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan pangan berada pada status sangat rentan. Aspek keterjangkauan pangan berada pada status sangat tahan pangan. Aspek pemanfaatan pangan berada pada status tahan dengan indikator yang masih belum optimal adalah rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun dan prevalensi stunting.

Article Info

Keywords:
Food security, FSI, FSVA

Abstract

Food security develops with the concept of ensuring that every individual and at all times can access food as the staple food needed both physically and economically. Food and nutritional security is the fourth pillar in the strategy to accelerate stunting prevention. The 2020 Food Security Index (FSI) of Provinsi Kepulauan Bangka Belitung is in the resilient category with an index of 71.21. In 2021 it has increased to 73.22 (resistant category). From 2022 to 2024 there will be a decrease respectively to 71.71, 71.14 and 70.21. This research aims to analyze the food security situation in Provinsi Kepulauan Bangka Belitung from 2020 to 2023 which includes aspects of food availability, accessibility and utilization. This research is a literature study using secondary data. The food security situation in Provinsi Kepulauan Bangka Belitung is seen based on the aspects of food availability, food acessibility and food utilization. The food availability aspect is at very vulnerable status. The food accessibility aspect is at very food secure status. The food utilization aspect is at a stable status with indicators that are still not optimal, namely the average length of schooling for women of more than 15 years and the prevalence of stunting.

✉ Alamat korespondensi:
Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, Indonesia
Email: kdwihandini@gmail.com

© 2025 Poltekkes Kemenkes Pontianak

Pendahuluan

Konsep dan pengertian ketahanan pangan terus berkembang dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Fokus utama ketahanan pangan pada tahun 1940 sampai 1970 adalah ketersediaan pangan pokok secara kuantitas dan stabilitas di tingkat negara (Lybaws, 2024). FAO pada tahun 1983 memperluas konsep ketahanan pangan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, akses dan stabilitas (Burlingame et al., 2020).

Tahun 1996 FAO kemudian memperbarui definisi ketahanan pangan dengan menambahkan aspek gizi dan budaya. Tahun 2001 diperbarui dengan menambahkan akses sosial. Sehingga, saat ini terminologi ketahanan pangan dan gizi yang banyak dikenal adalah suatu kondisi semua individu setiap saat memiliki akses (fisik, ekonomi, sosial) terhadap makanan dengan jumlah cukup, kualitas yang baik, keamanan pangan terjamin serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dengan preferensi makanan yang didukung oleh pelayanan kesehatan dan sanitasi yang baik untuk hidup aktif dan sehat (Burlingame et al., 2020). Konsep inilah yang juga tercantum sebagai defisini ketahanan pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pengukuran ketahanan pangan dapat dilakukan di tingkat makro dan mikro. Pengukuran ketahanan pangan banyak dari segi akses pangan. Pengukuran ketahanan pangan di tingkat makro dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah *Global Food Security Index* (GFSI), *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), *Global Hunger Index* (GHI), *The Hunger and Nutrition Commitment Index* (HANCI). Sedangkan pengukuran ketahanan pangan di tingkat mikro dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, pengalaman kelaparan dan akses pangan serta pendekatan *coping* (Lybaws, 2024).

Menurut Tono et al. (2022), Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Namun, aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi melibatkan berbagai sektor dalam rangkaian isu terkait produksi, ketersediaan pangan, gizi dan kesehatan. Pandemi covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah berkembang menjadi salah satu krisis global bidang kesehatan, ekonomi dan sosial yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang rawan pangan dan kelaparan secara signifikan.

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang terus disoroti oleh lembaga-lembaga internasional. Bahkan, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas dalam *Suistanable Development Goals* (SDGs) melalui organisasi United Nation (PBB). Sorotan lembaga internasional terkait ketahanan pangan menjadi bukti bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu prioritas dan mesti dipecahkan solusinya untuk tujuan jangka panjang. Hal itu dikarenakan isu ketahanan pangan tidak hanya sebatas ketersediaan pangan, namun lebih kompleks seperti keterjangkauan pangan dan keamanan pangan.

Saat ini peringkat Indonesia dalam sektor ketahanan pangan berada di posisi 63 dari 113 negara. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara agraris dan merupakan negara G20. Sebuah dokumen yang dirilis oleh lembaga pangan internasional, menunjukan bahwa terdapat setidaknya 22,9 juta orang terdampak kelaparan, 30,8% balita terancam gizi buruk, dan menghadapi populasi padat sekitar 270 juta jiwa. Hal ini menjadi penanda bahwa Indonesia masih rawan terhadap ketahanan pangan (Nisa, 2024).

Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2019),ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama peningkatan status gizi masyarakat yang paling erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Situasi produksi pangan dalam negeri serta ekspor dan impor pangan akan menentukan ketersediaan pangan yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di tingkat wilayah. Sementara ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga akan ditentukan pula oleh daya beli masyarakat terhadap pangan. Selain itu, ketahanan pangan tingkat individu akan berdampak pada status gizi dan kesehatan seseorang, yang pada akhirnya juga berpengaruh pada kemampuan suatu negara untuk mencetak sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Provinsi ini memiliki 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

Badan Ketahanan Pangan (2020a) menunjukkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berada pada kategori tahan dengan indeks 71,21. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 73,22 (kategori tahan) Tono et al. (2021). Tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan berturut-turut menjadi 71,71 (Tono et al., 2022), 71,14 (Badan Pangan Nasional, 2023a) dan 70,21 (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2024 menunjukkan terdapat 10

kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam wilayah rentan prioritas 3. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat 5 kecamatan yang termasuk dalam wilayah rentan prioritas 3 (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, 2023).

Ketahanan pangan dan gizi merupakan pilar ke empat dalam strategi percepatan pencegahan stunting. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stunting, salah satunya adalah ketahanan pangan. Jika kerawanan pangan terjadi dalam suatu rumah tangga hal ini dapat meningkatkan proporsi kejadian stunting yang semakin meningkat yang secara langsung dapat meningkatkan angka kejadian stunting nasional meningkat dan akan terus menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. Studi literatur adalah pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti. Studi literatur disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian psustaka (Munib & Wulandari, 2021).

Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi topik pembahasan yang sesuai dengan kata kunci berupa ketahanan pangan, indeks ketahanan pangan dan peta kerawanan dan kerentanan pangan. Kriteria lain yang digunakan adalah tahun publikasi literatur dikeluarkan maksimal berada pada rentang tahun 2015 – 2024. Instansi yang mempublikasikan literatur juga merupakan salah satu kriteria, yaitu instansi yang menaungi permasalahan ketahanan pangan maupun instansi pendidikan yang berfokus pada penelitian-penelitian ketahanan pangan seperti Badan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan IPB University.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi data ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Data tersebut bersumber dari Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020 sampai dengan 2024.

FSVA merupakan peta tematik yang berisi potret visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan yang dipublikasikan oleh Badan Pangan Indonesia. FSVA disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Setiap aspek ketahanan pangan terdiri dari beberapa indikator yang digunakan sebagai komponen untuk menilai status kerentanan daerah terhadap kejadian kerawanan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2020b).

Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No.	Indikator	Bobot
Aspek Ketersediaan Pangan		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30
	Sub Total	**0,30**
Aspek Keterjangkauan Pangan		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik	0,075
	Sub Total	**0,30**
Aspek Pemanfaatan Pangan		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Prevalensi balita stunting	0,05
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
	Sub Total	**0,40**

Sumber : (Tono et al., 2022)

FSVA menggunakan sembilan indikator yang merupakan turunan dari ketiga aspek tersebut, yaitu : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65%, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk persentase balita dengan tinggi di bawah standar (stunting) dan angka harapan hidup (Badan Ketahanan Pangan, 2020b).

IKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FSVA, karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan

dalam penyusunan FSVA. Secara khusus, IKP disusun untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah serta memberikan Gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan wilayah.

Tabel 2. Bobot Indikator Kota Berdasarkan *Expert Judgement*

No.	Indikator	Bobot
Aspek Ketersediaan Pangan		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	-
	Sub Total	**-**
Aspek Keterjangkauan Pangan		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik	0,125
	Sub Total	**0,45**
Aspek Pemanfaatan Pangan		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,08
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Prevalensi balita stunting	0,08
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
	Sub Total	**0,55**

Sumber : Tono et al. (2022)

Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI dan GHI. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement* yang ditampilkan dalam Tabel 1. Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Hal ini karena mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri melainkan berasal dari perdagangan antar wilayah.

Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan bersih adalah nol, sehingga IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan pada delapan indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Besaran bobot yang digunakan untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kota (Tabel 2).

Perhitungan IKP dilakukan melalui tiga tahapan yaitu standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0-100), kemudian menjumlahkan nilai perkalian masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus, dan yang terakhir mengelompokkan wilayah ke dalam enam kelompok sesuai *cut off point* IKP.

Adapun pengelompokkan wilayah berdasarkan status ketahanan pangan mencakup prioritas 1 atau sangat rentan, prioritas 2 atau rentan, prioritas 3 atau agak rentan, prioritas 4 atau agak tahan, prioritas 5 atau tahan dan prioritas 6 atau sangat tahan. Wilayah yang masuk ke dalam prioritas 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada prioritas 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Data yang digunakan sebagai hasil penelitian adalah data indikator dalam FSVA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua komponen indikator pada FSVA dibahas secara mendalam, kritis dan sistematis. Pembahasan mendalam meliputi faktor penyebab, kemungkinan risiko yang terjadi dan solusi untuk mengatasi masalah pada setiap komponen indikator. Pembahasan didasarkan pada kajian terhadap literatur yang relevan, terkini dan dikeluarkan oleh instansi terkait dan disajikan secara naratif.

Hasil dan Pembahasan

Ketersediaan Pangan

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan (Badan Ketahanan Pangan, 2020a).

Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Aspek ketersediaan pangan dalam penyusunan FSVA didekati hanya pada aspek produksi pangan wilayah, sementara itu data perdagangan pangan, stok pedagang, dan bantuan pangan tidak semua tersedia pada tingkat kabupaten/kota (Badan Ketahanan Pangan, 2020a).

Pangan meliputi produk serealia, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah, gula, dan produk hewani. Karena porsi utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, yaitu sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang per hari, maka yang digunakan dalam analisa kecukupan pangan yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok serealia, yaitu padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memenuhi tingkat kecukupan pangan pada tingkat provinsi maupun kecamatan (Badan Ketahanan Pangan, 2020a).

Tabel 3. Ketersediaan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	10,04	2,54	2,76	3,09	3,36

Sumber : FSVA Diolah

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita/hari. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Angka produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu dari Kementerian Pertanian. Data stok beras pemerintah daerah dari Badan Pangan Nasional (Mariani et al., 2022). Batasan yang digunakan dalam interpretasi indikator ini adalah sebagai berikut : defisit tinggi (≥ 1,50), defisit sedang (1,25 - <1,50), defisit rendah (1,00 - <1,25), surplus rendah (0,75 - <1,00), surplus sedang (0,50 - <0,75) dan surplus tinggi (< 0,50) (Badan Ketahanan Pangan, 2020a).

Tabel 3 menunjukkan kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2020 hingga 2024. Skor indikator ketersediaan pangan mengalami kenaikan dan penurunan. Namun demikian, skor indikator dari tahun 2020 sampai 2024 termasuk dalam status defisit tinggi. Badan Ketahanan Pangan (2020a), menyatakan kabupaten pada kelompok defisit tinggi tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi yang berada pada kelompok defisit tinggi diketahui bukan merupakan daerah sentra produksi padi dan jagung.

Peta Ketahanan dan Kerentanan (2024), menyatakan pada tahun 2024 bahwa setiap kabupaten terdapat wilayah dengan prioritas 1 (sangat rentan). Hal ini disebabkan karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan daerah produsen beras. Sehingga status kerentanan terhadap kerawanan pangan untuk aspek ketersediaan pangan akan menempatkan provinsi pada kategori prioritas 1 (sangat rentan).

Berdasarkan Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih Serealia dari 40 kecamatan 85% persen merupakan daerah yang rawan pangan (Prioritas 1-2) dan 15% daerah tahan pangan (prioritas 4-6). Penyebab defisit antara lain: (1) bukan daerah sentra produksi tanaman tangan; (2) alih fungsi lahan dan lain-lain; (3) pergeseran jadwal tanam; (4) keadaan cuaca yang kurang mendukung, dimana banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau; (5) penduduk lebih senang menambang timah dari pada bertani; (6) luas tanam sangat kurang; dan (7) puso. Selain itu daerah surplus pangan pokok yang mengalami bencana alam karena kekeringan dan banjir (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Hasil pemetaan Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih Serealia menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum swasembada dalam produksi pangan pokok. Untuk wilayah yang masuk dalam wilayah rentan pangan (prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3), dalam pemenuhan ketersediaan pangan di wilayahnya tentunya dengan mendatangkan dari luar wilayah. Hal ini sangat rentan apabila terjadi bencana alam dan gagal panen yang tentu saja akan mengakibatkan rawan pangan apabila tidak diantisipasi (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Penyediaan bahan pangan pokok untuk wilayah rentan pangan yang harus memperhatikan peningkatan produksi tanaman pangan selain padi, seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar sebagai bahan pangan pokok selain beras. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat “kalau belum makan nasi belum makan” harus diubah. Masyarakat harus diberikan sosialisasikan atau penyuluhan tentang aneka ragam pengganti nasi atau beras yang banyak terdapat disekitar kita, murah harganya dan juga dapat mengenyangkan (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Kondisi iklim, kesesuaian lahan, bencana berulang (kekeringan, banjir, dan lain-lain) adalah faktor-faktor yang juga dapat menjadi kendala terhadap kemampuan kabupaten-kabupaten yang mengalami defisit pangan pokok untuk mencapai swasembada. Kabupaten yang mengalami defisit produksi pangan pokok memiliki potensi sumberdaya lainnya yang dapat memberikan

pendapatan daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok dari daerah surplus. Dengan kendala aksesibilitas, ketergantungan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berasal dari produksi sendiri sangat tinggi, maka defisit pangan pokok perlu mendapat perhatian (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Menurut (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024), total kabupaten/kota yang masuk ke dalam Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 62 (12%). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat dan daerah bukan kepulauan. Selain itu daerah rentan rawan pangan juga beririsan dengan daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan).

Tantangan utama yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam aspek ketersediaan pangan adalah adanya peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi. Sensus penduduk mencatat jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 meningkat menjadi 1.511.899 jiwa. Jumlah ini meningkat 19.913 jiwa dibandingkan tahun 2022. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,7%/tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020) (Firmandika et al., 2022).

Intervensi penanganan kerawanan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan. Jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah serta kerjasama antardaerah. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan perbaikan sistem logistik pangan, stabilisasi (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (2023), menyusun rekomendasi kebijakan dengan memprioritaskan kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan dan kabupaten yang menghadapi masalah ketersediaan pangan sebagai lokasi pengentasan kerawanan pangan.

Keterjangkauan Pangan

Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pangan adalah untuk mempermudah atau meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan. Keterjangkauan pangan merujuk pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang cukup, baik melalui produksi sendiri, cadangan, pembelian, barter, hadiah, atau bantuan, termasuk program-program intervensi sosial dari pemerintah (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Tabel 4. Keterjangkauan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	4,73	4,68	5,07	4,61	4,70
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	15,47	15,21	15,15	19,22	12,14
Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik	0,30	0,42	0,23	0,18	0,07

Sumber : FSVA Diolah

Keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh faktor fisik, ekonomi, dan sosial. Meskipun pangan tersedia secara cukup di suatu wilayah, akses fisik mungkin terbatas bagi rumah tangga tertentu, misalnya karena lokasi yang terpencil atau infrastruktur yang kurang memadai. Secara ekonomi, daya beli masyarakat masih menjadi isu utama. Inflasi pangan dan kenaikan harga barang non-pangan, semakin menekan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang memadai. Ketersediaan lapangan kerja, terutama di sektor informal, menjadi semakin penting dalam mempengaruhi daya beli rumah tangga. Faktor sosial yang mempengaruhi keterjangkauan pangan meliputi preferensi budaya terhadap jenis makanan, tingkat pendidikan, serta pengetahuan masyarakat tentang gizi yang seimbang. Namun, konflik sosial dan dampak perubahan iklim juga tetap menjadi faktor risiko yang membatasi akses di beberapa wilayah (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Pendekatan yang digunakan dalam FSVA untuk memperkirakan keterjangkauan pangan rumah tangga tetap dilakukan melalui proksi dengan indikator-indikator yang lebih dinamis dan relevan, yaitu: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu

untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan. Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Namun demikian, skor pada indikator ini masih berada dalam kategori sangat baik (<10). Menurut (Afifah et al., 2024)Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Tahun 2023, di Kota Pangkalpinang 4,27%, Kabupaten Bangka 4,32%, Kabupaten Bangka Barat 2,71%, Kabupaten Bangka Tengah 5,29%, Kabupaten Bangka Selatan 3,11%, Kabupaten Belitung 6,46% dan Kabupaten Belitung Timur 6,73%. Angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan Maret 2024 sebesar 4,55%. Angka ini menempatkan Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat kemiskinan terendah ke-4 secara nasional.

Hasil analisis indikator persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan menggunakan data kemiskinan dari Komenko PMK diperoleh bahwa dari 47 kecamatan terdapat 1 kecamatan yang berada dalam prioritas 3 (agak rentan), 7 kecamatan pada prioritas 5 (tahan) dan 39 kecamatan pada prioritas 6 (sangat tahan). Adapun kecamatan pada prioritas 3 adalah Kecamatan Selat Nasik (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Kerentanan pangan, terutama dari sisi akses ekonomi, sangat erat kaitannya dengan rendahnya daya beli yang disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan membatasi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang beragam dan bergizi, memaksa mereka bergantung pada pilihan pangan yang lebih murah, tetapi sering kali rendah kandungan nutrisinya. Rumah tangga miskin cenderung mengandalkan sumber karbohidrat murah, seperti beras dan pangan berbahan dasar terigu, yang mengurangi akses terhadap makanan bernutrisi lebih lengkap seperti protein, sayuran, dan buah-buahan (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Tren penurunan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Pemulihan ekonomi ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, daya beli yang terjaga, serta kebijakan moneter yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Meskipun ekonomi Indonesia terus mengalami pemulihan, tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan harga komoditas pangan masih memengaruhi kinerja ekonomi (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Menurut Badan Pangan Nasional (2023c), distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil. Data yang digunakan bersumber dari Susenas, BPS.

Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai 2024 berada dalam kategori sangat baik (<30). Menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan (2024) terdapat satu kecamatan yang berada pada kategori sangat rentan (prioritas 1), satu kecamatan pada kategori agak tahan (prioritas 4), dua kecamatan pada kategori tahan (prioritas 5) dan 43 kecamatan pada kategori sangat tahan (prioritas 6).

Pangsa pengeluaran untuk pangan menjadi indikator signifikan dalam ketahanan pangan karena semakin besar porsi pengeluaran yang diarahkan untuk pangan, semakin rentan kondisi ketahanan pangan suatu rumah tangga. Berdasarkan kajian (Badan Pangan Nasional, 2023b), apabila lebih dari 65% dari total pengeluaran rumah tangga digunakan untuk pangan, maka distribusi pengeluaran tersebut dianggap tidak sehat dan rentan, mencerminkan ketahanan pangan yang lemah.

Menurut (Badan Pangan Nasional, 2023b), Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan. Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik bersumber dari Susenas, BPS.

Persentase rumah tangga tanpa akses listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai 2024 berada dalam kategori sangat baik (<10). Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 dengan indikator persentase rumah tangga tanpa akses listrik diperoleh bahwa seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di kategori prioritas 6 dengan status sangat tahan (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan hingga

kini upaya peningkatan rasio elektrifikasi terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur yang masih memiliki kesenjangan akses. Keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya menyediakan akses terhadap energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, meningkatkan akses terhadap pekerjaan, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga listrik menjadi salah satu indikator penting kesejahteraan wilayah dan rumah tangga, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Pemanfataan Pangan

Pemanfaatan pangan umumnya dipahami sebagai cara tubuh manusia untuk memanfaatkan berbagai komponen gizi yang diperoleh dari makanan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu. Asupan gizi beragam seimbang sesuai kecukupan kebutuhan tubuh untuk aktif dan produktif diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman diet/makanan, distribusi makanan antar anggota keluarga dalam rumah tangga, ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan dan kesehatan tubuh, dan lain-lain (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup di sekitarnya menentukan gambaran status gizi seseorang. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, ketahanan/kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi, terutama pada ibu/wanita saat ini, dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Terpenuhinya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA didekati dari lima indikator, yaitu: (i) tenaga kesehatan; (ii) akses air bersih; (iii) lama sekolah perempuan; (iv) balita stunting; dan (v) angka harapan hidup.

Tabel 5. Pemanfataan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	8,11	8,22	8,43	7,75	8,61
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	15,86	16,53	16,46	15,78	14,50
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	3,18	3,10	2,83	0,43	2,80
Prevalensi balita stunting	9,39	0,00	19,07	22,84	20,21
Angka harapan hidup pada saat lahir	70,86	73,22	71,10	71,14	71,60

Sumber : FSVA Diolah

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan. Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas, BPS (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024. Indikator ini mengalami penurunan pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024. Skor indikator ini dari tahun 2020 sampai 2023 berada pada kategori agak baik (7,5 - < 8,5) sedangkan pada tahun 2024 berada pada kategori baik (8,5 - < 9). Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan (2024), diketahui bahwa terdapat 14 kecamatan (29,8%) yang berada pada kategori agak rentan (prioritas 3), sedangkan sisanya 33 kecamatan (70,2%) berada pada kategori tahan (prioritas 4-6). Namun demikian, Menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan (2024) rata-rata nasional sebesar 8,94 tahun masih belum mencapai target pemerintah yang mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama enam tahun dan pendidikan sekolah menengah selama enam tahun.

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya et al. 2012). Ada tiga kemungkinan mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu: (1) pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan

terkait kesehatan kepada calon ibu; (2) kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya; dan (3) lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi maupun tinggal di lingkungan yang lebih baik, sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka (Abuya et al., 2012).

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (Heryanti et al., 2023). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. Sumber data berasal dari data Susenas, BPS (Badan Pangan Nasional, 2023c).

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2023 dan 2024. Skor indikator ini berada pada kategori sangat baik (< 30). Berdasarkan rekapitulasi wilayah prioritas indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih tahun 2024, 100% kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah prioritas 6 (sangat tahan).

Menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan (2024), rumah tangga banyak menggunakan air minum isi ulang yaitu sebanyak 56,10% dan urutan kedua air minum yang digunakan masyarakat berasal dari sumur terlindung (10,92%) dan urutan ketiga berasal dari sumur bora tau pompa (8,79%).

Akses air bersih memiliki peran penting dalam sanitasi dan kebersihan. Air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap zat gizi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, akses air bersih juga memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Akses air bersih yang tidak memadai mengharuskan peningkatan pangsa pengeluaran untuk air bersih. Ketika individu dan rumah tangga tidak memiliki cukup air yang bersih untuk memasak, mengairi tanaman, atau memberi minum ternak, maka akan mempengaruhi strategi penghidupan ekonomi rumah tangga (Burlingame et al., 2020).

Di samping itu, hubungan antara akses air dan ketahanan pangan telah dikonseptualisasikan melalui tiga jalur yang berbeda yaitu sebagai berikut :

a) kurangnya akses air bersih untuk keperluan rumah tangga merupakan penyebab utama penyakit yang berhubungan dengan air (misal diare) yang mendorong terjadinya malnutrisi akibat ketidakmampuan penyerapan zat gizi.
b) Kurangnya akses terhadap air yang diperlukan untuk tujuan produktif seperti peternakan, irigasi, dan tujuan produktif lain akan mengurangi peluang untuk memproduksi pangan dan/atau menghasilkan pendapatan.
c) Kurangnya sumber air terdekat yang memadai mengakibatkan lamanya waktu untuk mendapatkan akses terhadap air, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk kegiatan produktif lainnya.

Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai 2024 berada pada kategori sangat baik (< 5). Berdasarkan rekapitulasi wilayah prioritas, terdapat satu kecamatan berada pada wilayah prioritas 4 (agak tahan), delapan kecamatan pada wilayah prioritas 5 (tahan) dan sisanya 38 kecamatan berada pada wilayah prioritas 6 (sangat tahan) (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Menurut Badan Pangan Nasional (2023c) ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah.

Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan. Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kementerian Kesehatan.

Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai 2024

mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sampai 2022 skor pada indikator ini berada pada kategori baik (< 20). Namun hal ini bisa saja disebabkan bukan karena tidak adanya kejadian stunting, tetapi karena ketidaktersediaan data. Tahun 2023 dan 2024 skor indikator ini berada pada kategori kurang (20 - < 29). Namun demikian, prevalensi stunting tahun 2024 mengalami penurunan 2,63% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan rekapitulasi wilayah prioritas, seluruh kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah prioritas 4 dengan status agak tahan (Peta Ketahanan dan Kerentanan, 2024).

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Status ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak, selain pola asuh dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih. Sedangkan pola konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang diderita berpengaruh langsung terhadap status gizi anak. Setiap faktor penyebab baik langsung ataupun tidak langsung akan saling mempengaruhi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, anak yang konsumsi pangannya kurang baik maka daya tahan tubuhnya akan lemah, sehingga akan lebih mudah terserang infeksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizinya. Seorang anak dengan konsumsi pangan yang baikpun tidak serta merta memiliki status gizi yang baik. Apabila anak tersebut sering menderita penyakit infeksi, maka situasi kesehatannya tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi oleh tubuh yang berpengaruh terhadap status gizinya (Badan Pangan Nasional, 2023a).

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi tiga masalah gizi yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pangan, yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita (*underweight*), fenomena anak pendek (stunting), dan masalah kelebihan gizi, yaitu overweight dan obesitas pada kelompok usia di atas 18 tahun. Tidak hanya masalah gizi makro, masalah kekurangan zat gizi mikro seperti kekurangan vitamin dan mineral yang menjadi penyebab masalah anemia pada ibu hamil, kekurangan vitamin A, kekurangan mineral Iodium, juga masih menjadi beban gizi yang harus segera ditangani (Badan Pangan Nasional, 2023a).

Sebuah studi mereview penelitian-penelitian yang mengevaluasi hubungan antara kerawanan pangan dan malnutrisi, menemukan bahwa kerawanan pangan dapat mempengaruhi status gizi dengan lima jal ur konsumsi pangan yang tidak adekuat dalam jangka waktu yang lama, gizi buruk ibu dan anak, praktik pemberian makan, kondisi mental pengasuh, dan fungsi sistem imun (Burlingame et al., 2020).

Secara teknis kesehatan, anak stunting adalah salah satu bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Janin dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang cukup melalui ibunya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi sangat krusial karena menentukan kualitas bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang di dua tahun pertama kehidupannya (Badan Pangan Nasional, 2023a).

Menurut (Tono et al., 2022), perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari BPS. Angka harapan hidup pada saat lahir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai 2024 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 71,58. Nilai ini berada pada kategori sangat baik (> 70).

Penutup

Situasi ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan pangan berada pada status sangat rentan. Aspek keterjangkauan pangan berada pada status sangat tahan pangan. Aspek pemanfaatan pangan berada pada status tahan dengan indikator yang masih belum optimal adalah rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun dan prevalensi stunting.

Daftar Pustaka

Abuya, B. A., Ciera, J., & Kimani-Murage, E. (2012). Effect Of Mother's Education On Child's Nutritional Status In The Slums Of Nairobi. *BMC Pediatrics*, *12*(1), 1. https://doi.org/10.1186/1471-2431-12-80

Afifah, U. N., Sianipar, R. Y., Rojani, Anindita, N. J. M., Susianti, D. R., Darmawan, Fatir, B. I., & Chairani, N. F. (2024). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2024. In *Indonesia.Go.Id*. https://indonesia.go.id/province/kepulauan-bangka-belitung

Badan Ketahanan Pangan. (2020a). Indeks Ketahanan Pangan 2020. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).

Badan Ketahanan Pangan. (2020b). *Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi 2020*.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). *Kebijakan Strategis*

Ketahanan Pangan Dan Gizi 2020-2024.

Badan Pangan Nasional. (2023a). Indeks Ketahanan Pangan 2023. In *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* (Vol. 58, Issue 12).

Badan Pangan Nasional. (2023b). *Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Data Indikator Tahun 2022)*.

Badan Pangan Nasional. (2023c). *Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Data Indikator Tahun 2023)*.

Burlingame, B., Clapp, J., Solh, M. El, Kadlecikova, M., Xiande, L., Mati, B. M., Moseley, W., Rao, N., Rosswall, T., Sarpong, D., Shideed, K., Vinas, J. M. S., & Thilsted, S. (2020). *Food Security And Nutrition Building A Global Narrative Towards 2030*. https://doi.org/10.1109/ccgrid57682.2023.00010

Firmandika, R., Afifah, U. N., & Sianipar, R. Y. (2022). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023*.

Heryanti, V., Chandalela, A., Siregar, L. A., Yuliyanti, I., Mahariska, D., Harfika, R., Ristiyani, E., Mustapriadi, D. A., Sugihartini, Kusita, B., Kristanti, Ns. E., Mahyunarsih, R., Aldi, D., Damayanti, S., Hernawati, Y., Marlia, S. R., & Falevi, M. N. (2023). Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).

Lybaws, L. (2024). *Hubungan Food Waste Dan Food Coping Strategies Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berisiko Stunting*. Institut Pertanian Bogor.

Mariani, Anindita, N. J. M., Nurhamidah, R., Agustina, R. P., Jannah, S. A., & Akbar, W. P. (2022). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam 2022. In *BPS-Statistics of Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang*.

Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, *7*(1), 160–172. https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154

Nisa, N. A. (2024). Determinan Ketahanan Pangan Di Indonesia (2019-2021). *Program Studi Ekonomi Pembangunan*.

Peta Ketahanan dan Kerentanan. (2024). Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. (2023). *Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability Altas/FVSA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

Tono, Andayani, D. W., Hidayat, A., Maheswari, L. D., & Ulfa, N. A. (2022). Indeks Ketahanan Pangan 2022. In *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* (Vol. 58, Issue 12).

Tono, Andayani, D. W., Maheswari, L. D., & Ulfa, N. A. (2021). *Indeks Ketahanan Pangan 2021*.